

Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir

Ardiansya Putra¹ Mimin Sundari Nasution²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: ardiansya.putra2473@student.unri.ac.id¹ mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya minat anak untuk sekolah, lemahnya ekonomi keluarga, teman sepeergaulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih adanya anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Hal ini dikarenakan jumlah yang terdata anak yang tidak sekolah dan putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 101 anak. Berdasarkan analisis penelitian dan kendala yang ditemukan hendaknya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir perlu terus melakukan sosialisasi guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. sosialisasi tentang bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar), perlu melakukan kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam menekankan angka anak putus sekolah secara terprogram seperti tokoh masyarakat dan orang tua siswa.

Kata Kunci: Peran, Kebijakan, Pendidikan

Abstract

This research aims to find out and analyze the extent of the role of the Indragiri Hilir District Education Office in carrying out its main duties and functions and to determine the factors that cause children to drop out of school. The main problem in this research is the child's lack of interest in school, weak family economy, and social friends. This research uses a qualitative descriptive research method with data sources from interviews, observations and documentation. Based on the research results, it can be concluded that the role of the Indragiri Hilir Regency Education Office has not been maximized in carrying out its duties and functions because there are still children who do not go to school and have dropped out of school. This is because the recorded number of children who do not go to school and have dropped out of school in Indragiri Hilir Regency is 101 children. Based on research analysis and the obstacles found, the Indragiri Hilir District Education Office needs to continue to carry out outreach in order to increase public awareness about the importance of education. Socialization regarding KIP (Smart Indonesia Card) assistance, it is necessary to carry out integrated collaboration between the parties involved in emphasizing child numbers. programmatic dropouts such as community leaders and students' parents.

Keywords: Role, Policy, Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

UD 1945 mengamanatkan pemerintah melaksanakan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang dituangkan dalam pembukaan. Dalam upaya ini, diperlukan partisipasi dari pemerintah federal dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, antara lain komitmen dukungan, asas desentralisasi dan dekonsentrasi, serta otonomi daerah dengan pemerintahannya sendiri. Tentu saja prinsip desentralisasi memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Mereka kini lebih leluasa dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya, khususnya dalam hal sumber daya manusia. Pemerintah daerah berperan penting dalam melindungi hak-hak konstituenya karena mereka sudah mengenal daerah tersebut dan memahami kondisi serta tuntutan, dalam hal ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan (Triandkk, 2019). Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang terdapat didalam pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kewenangan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Kajian yang berlandaskan UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 ini mengkaji persoalan-persoalan yang sezaman dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib, khususnya pendidikan. Urusan mutlak, urusan konkuren, dan urusan umum merupakan ketiga jenis urusan pemerintahan. Dinas pendidikan dan pemerintah daerah mungkin akan membuat inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan di wilayahnya masing-masing. Hal ini akan memfasilitasi administrasi dan penyediaan pendidikan berkualitas tinggi, adil dan adil bagi semua masyarakat, selain mendorong otonomi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan (Benjamin dkk. 2017). Anggaran Pemerintah Pusat (APBN) yang dialokasikan melalui sejumlah program akan berfungsi sebagai kekuatan stabilisasi untuk memastikan bahwa setiap orang di setiap daerah memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, adil, dan setara. Hasilnya, pendidikan dapat didistribusikan secara adil ke seluruh wilayah, sehingga tidak ada satu wilayah pun yang tertinggal dari wilayah lainnya. (Benjamin dkk 2017). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memang mengatur perlunya penjabatan anggaran untuk pembiayaan dan peningkatan pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama-sama menyisihkan paling sedikit 20% anggaran masing-masing untuk uang pendidikan di samping gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan, sesuai Pasal 49 ayat (1) Meskipun amanah tersebut mempunyai landasan hukum yang jelas dan disertai dengan sejumlah justifikasi dan penjelasan, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah karena pelaksanaan amanat yang tidak sesuai standar (2012) Fauzi dkk.

Program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia adalah wajib belajar, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah mengawasi inisiatif ini. Agar masyarakat Indonesia dapat mewujudkan potensi mereka secara maksimal, menjadi anggota masyarakat yang mandiri, atau melanjutkan pendidikan tinggi, tujuannya adalah memberikan mereka pendidikan minimal. (Lukman) Nasib negeri ini ditentukan oleh generasi muda, generasi penerus. Anak-anak merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga karena merekalah yang mempunyai kekuatan dalam menentukan pertumbuhan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak harus disadarkan akan hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan. Namun pada kenyataannya, tidak semua tuntutan pendidikan anak dapat dipenuhi. Salah satu indikasinya adalah tingginya persentase anak putus sekolah di Indonesia. Remaja yang tidak menyelesaikan sekolahnya disebut putus sekolah. Permasalahan anak putus sekolah merupakan permasalahan yang rumit dan masih menjadi tantangan untuk diselesaikan. Ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap putus sekolah, termasuk masalah dengan keluarga, masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Variabel penyebab

tersebut dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran pendidikan pada seluruh pihak yang terlibat, termasuk keluarga, anak, dan lingkungan. Kesadaran anak-anak terhadap pendidikan dapat menjadi insentif yang kuat untuk berkonsentrasi menyelesaikan sekolahnya. Organisasi lain yang membantu menurunkan angka putus sekolah adalah pemerintah. Diharapkan bahwa program pendidikan pemerintah akan membantu anak-anak dalam mengejar Pendidikan.

Sejalan dengan Tugas Pokok Dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan; dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beberapa fungsi: Perumusan kebijakan eknik dibidang Pendidikan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, pendidikan juga menjadi senjata untuk membebaskan individu dari kebodohan, penindasan, kemiskinan, dan keterbelakangan yang menjadi ciri masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan diharapkan dapat dirancang dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang unik di setiap bidang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukumnya. Secara spesifik, Pasal 14 ayat 1 BAB III tentang “pembagian urusan pemerintahan” menyebutkan bahwa pemerintahan daerah kabupaten dan kota merupakan urusan skala kabupaten dan kota, “salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan”. Selain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan dan berbagai beasiswa untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar telah mengeluarkan panduan tentang pentingnya mencegah anak-anak yang berpotensi putus sekolah. keluar dari sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan beberapa upaya untuk mengatasi anak putus sekolah. Ajari anak-anak dan orang tua tentang nilai pendidikan dan bersekolah.

Persentase siswa putus sekolah SD dan SMP di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 403 SD dan 149 SMP. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan instansi pemerintah dalam struktur Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan peraturan teknis pendidikan dan melakukan pengawasan terhadap kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kabupaten tersebut. Namun dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan yang melindungi hak masyarakat atas pendidikan. Beberapa anak di lapangan masih belum menyelesaikan sekolah, sehingga belum sepenuhnya memenuhi hak mereka atas pendidikan. informasi tentang anak-anak yang tidak bersekolah antara tahun 2019 dan 2021. Akibatnya, banyak generasi muda di Kabupaten Indragiri Hilir yang putus sekolah, dan pendapatan penduduk yang sedikit dari perkebunan dan perikanan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka. Selain itu, lingkungan sekitar dan kurangnya keterlibatan orang tua di sekolah mempengaruhi pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah. Tabel di bawah ini menampilkan data jumlah anak putus sekolah.

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir yang pada tahun 2023 akan dihuni 101 anak, masih mempunyai kasus putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang tinggi. Keadaan anak-anak yang tidak bersekolah jelas sangat memprihatinkan karena pada saat ini anak-anak usia sekolah seharusnya dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap cita-cita tersebut, pemerintah mempunyai tugas yang menantang di depannya dalam mengembangkan peradaban dan taraf hidup yang lebih tinggi dan mandiri. Berbagai permasalahan kemasyarakatan yang semakin mengancam masyarakat Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Tingginya persentase anak putus

sekolah pada usia sekolah anak usia sekolah (usia produktif) merupakan salah satu indikator rendahnya tingkat pendidikan. Selain tingginya angka putus sekolah, tanda lain rendahnya standar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya motivasi anak dan orang tua untuk melanjutkan pendidikan (Kusbowo, 2019). Hal ini mungkin merupakan salah satu faktor penyebab buruknya tingkat pendidikan, yang merupakan salah satu permasalahan utama yang disebutkan di atas. Namun jika ditelaah lebih dalam, masyarakat, orang tua, dan pemerintah perlu memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka dan peran mereka dalam struktur sosial bangsa dan negara (Kusbowo, 2019).

Sebagai cara untuk merasa bertanggung jawab terhadap keberlanjutan bangsa. Generasi penerus bangsalah yang akan meneruskan nilai-nilai dan perjuangan bangsa. Untuk menjamin bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan, anak-anak juga harus diperlakukan sebagai sumber daya manusia dan dilindungi dari bahaya dan intervensi dari luar. Permasalahan putus sekolah di Indragiri Hilir tidak dapat dipisahkan dari fungsi pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan. Secara khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bertugas menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat atas pendidikan, mendorong tumbuhnya anak-anak dan masyarakat yang maju, bermutu, sejahtera, dan mandiri dengan menciptakan keunggulan komparatif di setiap daerah dan bertumpu pada sumber daya manusia. kualitas dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Dari uraian di atas penulis melihat ada beberapa fenomena yang mendukung diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Anak-anak yang terus putus sekolah disebabkan oleh faktor luar, seperti perekonomian keluarga yang sulit sehingga menyebabkan sejumlah masalah dalam membayar biaya hidup. Akibatnya, anak sering kali dilibatkan dalam menafkahi keluarganya, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas belajar dan menyulitkan mereka mengikuti kelas.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir belum memberikan bantuan apa pun kepada anak putus sekolah dan tidak melakukan pemantauan. Buktinya, pembubaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
3. Kurang optimalnya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh rendahnya alokasi dana pendidikan, karena belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan terkait anak putus sekolah.
4. Tujuan pelayanan pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia belum tercapai, namun masih banyak anak-anak di Kabupaten Indragiri Hilir yang putus sekolah pada usia dini.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian "Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kabupaten Indragiri Hilir). Dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dapat penulis rumuskan masalah penelitian, dengan: Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kabupaten Indragiri Hilir)? Apa saja faktor penghambat yang di alami oleh dinas pendidikan dalam mengatasi kasus anak putus sekolah? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kabupaten Indragiri Hilir). Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kabupaten Indragiri Hilir).

Penelitian Terdahulu

1. Fani Fitriani (2018) menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Rumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015." Temuan

penelitian menunjukkan sejumlah faktor, seperti kesulitan ekonomi keluarga, masalah lingkungan, nilai rendah, sering bolos, dan sering membolos, yang meningkatkan risiko anak putus sekolah. Terdapat variasi topik dan lokasi penelitian, namun penelitian ini berpusat pada peran Dinas Pendidikan dalam memahami implementasi pencegahan anak putus sekolah di Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada saat Pekanbaru. Peneliti dari berbagai lokasi penelitian-peneliti dari kabupaten hilir Indragiri misalnyamembedakan satu sama lain. Dari sudut pandang penelitian, keduanya sebanding karena mereka berkonsentrasi pada subjek anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah, khususnya peran yang dimainkan oleh departemen pendidikan dalam melayani demografi ini. Selain itu, tujuan penelitian ini, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan dapat menangani anak putus sekolah guna mengurangi jumlah anak putus sekolah. Untuk itu, metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

2. Ricardo Saputra (2017) Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, penelitian “Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD tahun 2012-2015” mengungkapkan bahwa pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap dana BOS masih kurang sehingga menyebabkan indikasi penyalahgunaan. Faktor dampak menghambat proyek penelitian terhadap anak-anak putus sekolah sekolah dasar ini untuk mencapai kinerja terbaiknya pada tahun 2012 hingga 2015. Terdapat tanda-tanda penyelewengan dana BOS karena masih lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap dana tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan teori peran yang berbeda, serta lokasi yang berbeda di Kota Pekanbaru (Thoha 2007). Metode uji deskriptif kualitatif dan penerapan ide peran sebagai teori mempunyai persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis dan peneliti terdahulu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui bagaimana fungsi departemen pendidikan dalam kaitannya dengan hal tersebut
3. Anggraini Helda (2014) dengan judul Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Temuan penelitian yang menggunakan metodologi deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Medan mengalami penurunan. Informasi ini diambil dari data pendidikan dasar tahun 2005–2012. Selain itu, terdapat variasi dalam bidang fokus penelitian. Penelitian sebelumnya hanya mengamati tiga staf atau pegawai PMP (program pengembangan pendidikan) dan direktur PPMP (program pengembangan mutu pendidikan). Penelitian yang dilaksanakan di Jalan Pelita IV No. 77 Kelurahan Medan Durian ini fokus pada tujuan dan sasaran. Temuan penelitian menunjukkan adanya penurunan angka putus sekolah di Kota Medan. Data fundamental Departemen Pendidikan dari tahun 2005 hingga 2012 digunakan untuk mengumpulkan informasi ini. Penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada remaja yang tinggal di luar sekolah di daerah hilir Indragiri. Mengurangi frekuensi putus sekolah di kalangan generasi muda di kabupaten hilir Indragiri adalah tujuan studi ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan ide peran sebagai landasan teori. Judul penelitiannya hampir sama.
4. Yani talakua (2018) dengan judul penelitian “ Peran Take Holder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dan temuannya menunjukkan bahwa pemerintah kota Ambon berupaya secara aktif untuk mengoptimalkan, meminimalkan, dan menurunkan jumlah anak putus sekolah di kota tersebut. Pemerintah juga berencana untuk terus berupaya menurunkan angka putus sekolah, setidaknya sampai hal tersebut tercapai, jika diperlukan. Berbeda dengan penelitian keempat yang dilakukan di Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku, seperti yang

tertera pada judul. gunakan hanya satu variabel, x. Telah terbukti bahwa Pemerintah Kota Ambon berupaya mengoptimalkan, meminimalkan, dan menurunkan angka putus sekolah di kota tersebut sambil melakukan penelitian yang menekankan hal tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian penulis berkonsentrasi pada generasi muda di Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak bersekolah. lokasi penelitian yang berbeda dari yang digunakan dalam penyelidikan sebelumnya. karena lokasi penelitian berada di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian keempat ini dan penelitian ini serupa, yaitu keduanya berupaya untuk mengetahui penyebab putus sekolah dan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan layanan pendidikan untuk mengatasi masalah ini. Mengurangi jumlah anak di kabupaten tersebut yang tidak bersekolah adalah tujuan utama. Kabupaten Hilir Indragiri.

5. Ahmad Fauzi (2012) Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan diberi judul "Analisis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo". Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Wajo meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan bantuan keuangan, beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, pelaksanaan program bantuan siswa miskin (BSM), dan penerbitan dana bantuan siswa miskin (BSM). dari kebijakan pendidikan. Penelitian pertama dilakukan di Kabupaten Wejo, sesuai dengan judulnya, sehingga membawa kita pada perbedaan akhir antara kedua penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai peran pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam menurunkan angka putus sekolah. Berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penggunaan teori peran dan metode penelitian kualitatif merupakan dua bidang dimana penelitian ini dan penelitian keenam serupa. Selain itu, penelitian penulis saat ini dan penelitian terdahulu juga memiliki kemiripan, yaitu sama-sama berupaya mengetahui peran dinas pendidikan dalam menangani anak tidak bersekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menyajikan temuan penelitian sebagai landasan fokus penelitian berdasarkan data lapangan mengenai peran Departemen Pendidikan dalam menangani anak, guna mengatasi permasalahan yang diangkat dan sejalan dengan tujuan penelitian. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi lokasi penelitian anak putus sekolah. Sebaliknya, penelitian kualitatif didefinisikan oleh Creswell (2016) sebagai metode untuk mengidentifikasi dan memahami suatu fenomena sentral. Dengan demikian, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti berbicara dengan berbagai macam informan. Biasanya, data ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau teks melalui pernyataan-pernyataan yang selanjutnya diperiksa. Temuan analisis dapat berbentuk fenomenologi permasalahan penelitian, yang memungkinkan peneliti mengevaluasi informasi dan menarik kesimpulan tentang hasilnya. Peneliti kemudian menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya. Laporan tertulis digunakan untuk menggambarkan hasil akhir penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan "tempat penelitian" adalah wilayah di mana para ilmuwan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk membicarakan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Pendorong mendasar dipilihnya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lokasi penelitian adalah meningkatnya penurunan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi untuk melihat bagaimana departemen pendidikan dapat menurunkan angka putus sekolah.

Penulis penelitian ini mengumpulkan informasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pemilihan informan dilakukan dengan pengetahuan bahwa orang-orang terpilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang telah dikaji secara menyeluruh. Penulis menemukan bahwa berdasarkan informasi tersebut terdapat sepuluh partisipan penelitian, empat diantaranya merupakan informan formal dan empat lainnya merupakan informan informal. Informan kunci adalah orang-orang yang memiliki beragam keterampilan dasar yang diperlukan untuk belajar. Subyek atau informan formal dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Kepulauan. Subyek atau informan informal antara lain orang tua anak putus sekolah dan pejabat Kabupaten Indragiri Hilir.

Teknik Pengumpulan Data

Metode berikut digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini:

1. Observasi. Kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penelitian diamati dengan cermat oleh para peneliti. Untuk mengumpulkan informasi awal dan data sekunder mengenai objek penelitian, dilakukan observasi. Melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian, peneliti dapat lebih memahami peran Dinas Pendidikan dalam membantu anak-anak tidak bersekolah di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Wawancara. Dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada informan dan mendapatkan tanggapannya, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai peran Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Dokumentasi. Proses penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti catatan, file, gambar, dan makalah lain yang dapat mendukung penelitian dan upaya penyelesaian data penelitian disebut dokumentasi.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Data yang ditangani atau dikumpulkan melalui survei lapangan, wawancara sumber, dan observasi oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir akan dianalisis penulis dalam bab ini. berfokus pada peran dinas pendidikan dalam membantu anak-anak di Kabupaten Indragiri Hilir yang putus sekolah. Dalam rangka meningkatkan peran serta aktif masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi organisasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu organisasi atau instansi pemerintah. di wilayah Kabupaten/Kota.

Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir melalui indikator yang dikemukakan oleh Shulhan 2013 Mengacu pada peran Dinas Pendidikan sebagai fokus yang di teliti, terdapat beberapa bentuk peran pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan yang di gunakan sebagai indikator penelitian (Shulhan, 2013), yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu mendukung penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu mendengarkan pengaduan masyarakat mengenai perbaikan dan kurangnya fasilitas dalam setiap sekolah sesuai daerah masing-masing
3. Peran pemerintah sebagai pendamping yaitu mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan

4. Peran pemerintah sebagai mitra yaitu pemerintah sebagai rekan dan penyalur untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan masyarakat maupun satuan pendidikan. Dalam menentukan kebijakan yang akan di buat.
5. Peran pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah wajib menjamin tersedianya dana untuk menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan indikasi berikut, penulis membahas temuan wawancara informan yang dilakukan guna memahami peran Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Peran Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat Dalam Pendidikan

Sebagai penyelenggara pelayanan publik yang penting bagi masyarakat, pemerintah mempunyai tugas untuk bertindak secara bertanggung jawab dan terus berusaha memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Pada hakikatnya, agar suatu permasalahan dapat diperkuat, diperlukan suatu landasan teori yang menghubungkan atau mendukungnya. Oleh karena itu, penulis akan memberikan sejumlah hipotesis yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan penelitian yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. Menanggapi pertanyaan “Apa Peran Dinas Pendidikan dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir?” dapat dilihat pada indikator pelayanan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk melihat tanggapan yang diberikan informan terhadap indikator Pelayanan Pemerintah Sebagai Pengabdian Masyarakat berikut ini: Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Dr.H.M. IRWAN, MM, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana pemberian pendapat mengenai anak putus sekolah: *“Jadi, anak yang putus sekolah bukan hanya mereka yang tidak mau menyelesaikannya karena tidak mau, tapi ada juga anak yang putus sekolah karena sebab lain. orang tua siswa juga bertanggung jawab, selain dinas pendidikan atau guru. Selain itu, dinas pendidikan berharap siswa yang putus sekolah dapat menyelesaikan pendidikan yang diwajibkan sembilan tahun, yaitu enam tahun sekolah dasar dan enam tahun sekolah dasar. tiga tahun di sekolah menengah pertama—sesuai dengan persyaratan hukum. Selain itu, kami telah berupaya memberikan pendidikan terbaik kepada siswa dengan menawarkan sekolah paket di Inhil. (selasa,07 mei 2024,pukul 11.00 wib)”*.

Peneliti kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan lain mengenai pemikiran Bapak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah anak berikut ini: *“Faktor putus sekolah sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keadaan perekonomian, lingkungan, dan ketidakpedulian orang tua terhadap kelanjutan pendidikan anaknya. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah adalah kesulitan keuangan orang tua mereka, sehingga memotivasi anak-anak tersebut untuk membantu mencari pekerjaan.(rabu,07 mei 2024)”* Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu orang tua siswa yang putus sekolah yang bernama ibu Arbaiyah pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024, Mengenai alasan utama anak tersebut tidak melanjutkan sekolah menengah pertama: *“kami dari keluarga tidak mampu, tapi saya selalu mengusahakan anak saya agar bisa melanjutkan sekolahnya, Masalahnya ada pada diri anak saya sendiri yang tidak mau bersekolah dia bilang sekolah itu capek, saya mau bekerja saja. Dengar anak saya berkata seperti itu kami selaku orang tua tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk sekolah, karena kami takut malah terjadi kenapa-napa terhadap anak saya (jumat,10 mei 2024)*

Wawancara serupa kemudian dilakukan penulis pada Minggu, 12 Mei 2024 dengan Ibu Parni, ibu seorang siswi yang putus sekolah di daerah hilir Indragiri. Tentang penyebab utama anak putus sekolah: *“Anak saya berhenti sekolah karena terinspirasi oleh teman-teman seusianya yang menyerah pada pendidikan, dan anak ibu saya juga berhenti sekolah. Saat anak*

saya masih sekolah, dia sering membolos, dan saya sering mendapat surat panggilan dari sekolah (12 Mei 2024)." Dengan demikian, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anak-anak putus sekolah di Kabupaten Hilir Indragiri dilayani oleh layanan pemerintah seperti halnya layanan masyarakat. Misi departemen pendidikan adalah memberikan layanan berkualitas tinggi. Berdasarkan keseluruhan data wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa sehubungan dengan layanan pemerintah Meskipun telah selesai sebagai layanan masyarakat, masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu remaja putus sekolah karena, pada kenyataannya, masalah ekonomi dan lingkungan. merupakan penyebab utama putus sekolah.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator Dalam rangka mendamaikan beragam kepentingan masyarakat dan memaksimalkan pembangunan daerah, tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi para pelaksana pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendanaan atau permodalan dengan memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat serta bantuan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Berdasarkan hasil wawancara di lakukan kepada bapak NURSYAH FAJAR,S.Sos,. M.Ap Selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Peran pemerintah sebagai fasilitator *"Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kami tetap mengakui bahwa membangun banyak sekolah di wilayah hilir Indragiri masih belum praktis. Meski anggarannya dinilai sangat kecil, namun hingga saat ini pihak kami telah berupaya menyelesaikan rehabilitasi berbagai pembangunan gedung sekolah baru (Selasa, 07 Mei 2024)."* Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Nursyah Fajar,S.Sos,.M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir Selasa,07 Mei 2024 beliau mengatakan tentang bagaimana perbaikan dan kurangnya fasilitas *"Dengan anggaran yang terbatas, kita putuskan dulu mana yang akan diprioritaskan. Saya merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan internal dengan anggaran yang ketat. Saya akui, ada banyak permasalahan pada infrastruktur dan pertumbuhan sekolah, termasuk fakta bahwa beberapa sebagian besar sekolah di kabupaten hilir Indragiri tidak memiliki komputer untuk entri data".* Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama dengan salah satu orang tua siswa yang putus sekolah di kabupaten indragiri hilir, yaitu kepada ibu Arbaniyah, pada hari jum'at 10 mei 2024, Pandangan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir ini: *"kalau yang ibu tau sekolah-sekolah yang berada disini memang masih kurang bagus ya dari pembangunanya, soalnya disini sekolah masih banyak yang masih terbuat dari papan, ada juga sekolah yang udah bagus dari tampak luarnya udah berbatu tapi tidak tau kalau fasilitasnya ya"*

Peran Pemerintah Sebagai Pendamping

Yaitu mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada bapak NURSYAH FAJAR,S.Sos,. M.Ap Selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Selasa,07 Mei 2024 mengenai Peran Pemerintah Sebagai pendamping keluhan masyarakat mengenai pendidikan: *"untuk masyarakat sendiri sejauh ini tidak ada yang mengeluhkan secara langsung ke dinas pendidikan tentang pendidikan anaknya, tetapi bisa kita lihat bahwa yang terjadi di masyarakat banyak yang mengeluhkan mengenai pendidikan anaknya, karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor sekolah yang jauh dari rumah siswa-siswi tersebut, dan kami selaku dinas pendidikan mendengar bahwa masyarakat yang berada di perdesaan inih untuk di bangunkan sekolah agar anak-anak mereka tidak jauh bersekolah, untuk mengatasi siswa-siswi yang jauh, dinas pendidikan sudah membuka sekolah marjinal dan sekolah satu atap terpadu, untuk siswa-siswi agar mau belajar, itu sudah salah satu upaya untuk mencegah anak putus sekolah, sekolah tersekolah tidak akan di tutup selagi masih ada anak yang ingin belajar (selasa,07 mei 2024)"*

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Nursyah Fajar,S.Sos.,M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana pendampingan terhadap masyarakat mengenai anak putus sekolah: *"dalam melakukan pendampingan terhadap siswa-siswi dan dalam masalah pendidikannya dinas pendidikan sudah memberikan upaya dengan memberikan surat edaran bahwa di larang ada pungutan uang, dan sekarang untuk sekolah tingkat SMP tidak ada bayar bagi yang negeri dan kami sudah melakukan sekolah gratis bagi anak-anak yang masih ingin bersekolah dengan yang itu tadi kami membuka sekolah marjinal dan sekolah satu atap terpadu"*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama dengan siswa yang putus sekolah di kabupaten indragiri hilir, yaitu kepada ibu parni, pada hari minggu 12 mei 2024, mengenai peran pemerintah sebagai pendamping: *"selama ini saya hanya bisa mengeluh dengan suami saya,dengan orang-orang terdekat saya mengenai anak saya yang berhenti bersekolah karena kekurangan biaya, anak saya udah dua orang yang berhenti sekolah yang satu di karenakan karna faktor pergaulan,yang satu karna faktor ekonomi, kalau untuk pendampingan langsung dari dinas pendidikan memang tidak ada, tetapi pernah gurunya datang kerumah untuk anak saya tu melanjutkan sekolah tetapi anak saya sepertinya sudah tidak mau (minggu 12 mei 2024)"* Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama dengan salah satu orang tua siswa yang putus sekolah di kabupaten indragiri hilir, yaitu kepada ibu Arbaniyah , pada hari Minggu 10 mei 2024. mengenai peran pemerintah sebagai pendamping *"seharusnya pemerintah lebih memperhatikan siswa-siswi yang kurang mampu seperti anak saya, dan lebih memperhatikan pendidikan-pendidikan di kabupaten indragiri hilir ini supaya tidak banyak anak yang putus sekolah"*. Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara mengenai Peran Pemerintah Sebagai Pendamping adalah dinas tidak menerima keluhan secara langsung dari masyarakat tentang pendidikan anak-anaknya.

Peran Pemerintah Sebagai Mitra

Yaitu pemerintah sebagai rekan dan penyalur untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan masyarakat maupun satuan pendidikan dalam menentukan kebijakan yang akan di buat. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada bapak NURSYAH FAJAR,S.Sos,. M.Ap Selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Selasa,07 Mei 2024 mengenai Peran pemerintah sebagai mitra: *"kami selaku kabid dinas pendidikan sudah menyediakan fasilitator berupa pembangunan sekolah-sekolah paket a dan b yang ada di inhil ini,tujuannya di bangun sekolah Anak-anak yang putus sekolah tetap dapat menyelesaikan pendidikannya dengan menggunakan paket A dan B.yang sduah tersediakan seperti sekolah paket a dan b, tujuan nya agar anak tersebut mendapat ijazah sekolah menengah pertama (Selasa,07 Mei 2024)"* Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Nursyah Fajar,S.Sos.,M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana mengenai Peran pemerintah sebagai mitra: *"Dalam kerja sama dinas pendidikan dengan masyarakat maupun satuan pendidikan itu tidak ada, tetapi memang menjadi kewajiban kita sebagai dinas pendidikan, bahwa pemerintah memberikan akses kepada siswa-siswi yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah melalui sekolah paket a-b. Dan ada juga pemerintah membuka sekolah rumah terpadu satu atap supaya siswa-siswi tersebut untuk mendapatkan ijazah sekolah tersebut"* Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama dengan salah satu orang tua siswa yang putus sekolah di kabupaten indragiri hilir, yaitu kepada ibu parni , pada hari minggu 12 mei 2024, mengenai Peran pemerintah sebagai mitra: *"memang saya selaku orang tua juga pernah dengar dengan sekolah paket a dan b, tetapi saya belum ada obrolan ke anak saya untuk mereka melanjutkan sekolahnya di paket a dan b, karena sekolah itu kemauan anaknya sendiri percuma di paksa kalau anak nya tidak mau juga percuma, kalau untuk biaya sekolah insyaallah*

bakal saya usahakan bagaimana pun caranya walaupun saya harus mengutang (minggu 12 mei 2024)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama dengan salah satu orang tua siswa yang putus sekolah di kabupaten indragiri hilir, yaitu kepada ibu Arbaniyah , pada hari Minggu 10 mei 2024 . mengenai Peran pemerintah sebagai mitra: *“walaupun ada sekolah paket a dan b kalau pun bayar uang dari mana kami, kalau masalah uang mungkin bisa di utangkan tapi kalau anak nya sudah tidak mau melanjutkan sekolah bagaimana,karna anak saya udah keenakan kerja arang terus berteman dengan orang yang tidak sekolah juga, jadi anak saya jadi malas untuk bersekolah lagi (Minggu 10 mei 2024)”* Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara mengenai Peran Pemerintah Sebagai Mitra pemerintah telah melakukan tugas nya yaitu dengan membuka sekolah paket agar siswa-siswi yang telah putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) namun hal terseut kembali lagi kepada pribadi siswa-siswi tersebut apakah mereka masih ingin melanjutkan pendidikannya apa tidak, jika kita ingin melihat dari segi perannya pemerintah telah menjalankan perannya sebagai mitra masyarakat dengan baik.

Peran pemerintah sebagai penyandang dana

Yaitu pemerintah wajib menjamin tersedianya dana untuk menyelenggarakan pendidikan. Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Nursyah Fajar,S.Sos,.M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana langkah-langkah peran pemerintah sebagai penyandang dana dalam mengatasi anak putus sekolah di Indragiri Hilir ini: *“mengenai langkah-langkah dalam mengatasi anak putus sekolah di kabupaten indragiri hilir ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa program-program seperti memberikan Pogram Indonesia Pintar (PIP). PIP ini biasanya di berikan kepada keluarga-kelurga yang terdaftar atau yang mempunyai kartu (PKH), Sehingga pihak sekolah mempunyai kewajiban untuk mendata siswa/i nya yang mempunyai kartu PIP untuk mendapatkan bantuan berupa KIP. Dan kami sebagai dinas pendidikan juga menyediakan bantuan berupa dana BOS bagi siswa/i yang tidak mempunyai kartu KIP untuk siswa/i yang kurang mampu, kami selaku dinas pendidikan sudah berupaya semaksimal mungkin tetapi kendala dalam dana BOS ini dibatasi oleh pusat contohnya kuota yang di salurkan dinas pendidikan 200 orang tetapi yang cair dananya dari 200 kuota itu hanya 100 kuota (Selasa,07 Mei 2024)”* Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama dengan salah satu orang tua siswa yang putus sekolah di kabupaten indragiri hilir, yaitu kepada ibu Saripah , pada hari minggu 12 mei 2024, mengenai program-program yang di buat oleh pemerintah dan dinas pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah: *“kalau ada program seperti itu bagus, tapi kami keluarga juga tidak terdata sebagai keluarga PKH, dan anak saya sekolah belum pernah mendapatkan bantuan dari sekolah(minggu 12 mei 2024)”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu orang tua siswa yang putus sekolah yang bernama ibuk Arbaiyah pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 , mengenai program-program yang di buat oleh pemerintah dan dinas pendidikan *“sebenarnya itu sangat bagus,tapi selama ini ada bantuan yang salah sasaran yaitu orang yang mampu malah dapat bantuan sedangkan kami yang dari keluarga tidak mampu malah tidak dapat bantuan, oleh karena itulah anak saya tidak bersekolah lagi (10 Mei 2024)”* Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara mengenai Peran pemerintah sebagai penyandang dana adalah dinas pendidikan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk siswa-siswi nya agar mendapatkan bantuan berupa KIP, dan bagi siswa-siswi yang tidak mempunyai KIP dinas pendidikan sudah menyalurkan bantuan berupa dana BOS tapi juga terkendala dengan kuota yang di salurkan ke pusat. Berdasarkan temuan penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi kabupaten ini dalam menerapkan strategi penanganan anak putus sekolah:

Faktor Hambatan Internal:

1. minimnya pemberian bantuan dana kepada siswa-siswi penerima KIP (kartu indonesia pintar)
2. belum terealisasi program BSM (bantuan siswa miskin)
3. belum terlaksanakannya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan
4. kurangnya pemerataan anggaran DANA BOSS

Faktor Hambatan Eksternal

Faktor Lingkungan

Berdasarkan Pengamatan Lingkungan, dalam menjalankan sebuah peran dinas pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di kabupaten indragiri hilir ini yang menjadi faktor penghambatan itu sendiri baik dari segi pemerintah dan dari segi masyarakat yakni pengaruh lingkungan sekitar karena dapat dilihat dari wawancara bersama bapak Nursyah Fajar,S.Sos.,M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir (selasa,07 mei 2024) mengatakan bahwa: *"lingkungan sekitar juga menjadi salah satu contoh yang paling kecil yang banyak ditemui di lapangan bahwa pergaulan anak yang melihat teman yang tidak bersekolah juga ikut-ikutan tidak sekolah,karena terpengaruh pergaulan itu tadi,jadi anak malas untuk bersekolah lagi"* Dari hasil wawancara di atas menjadi salah satu pemicu utama anak tersebut berhenti bersekolah, karena lingkungan tempat anak-anak itu bermain juga bisa menjadi dampak positif dan dampak negatif untuk anak tersebut. Berdasarkan dari faktor ekonomi dan dana dalam mengatasi anak putus sekolah di kabupaten indragiri hilir yang menjadi hambatan disini yaitu kebijakan program mengenai bantuan (PIP) Program Indonesia Pintar, dan bantuan dana BOS untuk kurang mampu tidak mendapatkan bantuan berupa KIP ataupun dana BOS dapat dilihat dari wawancara bersama bapak Nursyah Fajar,S.Sos.,M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir (selasa,07 mei 2024) mengatakan bahwa: *"Kami dari pihak dinas pendidikan dan pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu siswa yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan berupa dana Bos dan menjalankan program indonesia pintar (PIP) tetapi masalah dana Bos itulah yang menjadi kendala bagi dinas pendidikan karena sejauh ini selalu yang diajukan 200 kuota tapi yang cairnya itu Cuma 100 kuota , tetapi sejauh ini masih saja faktor ekonomi yang menjadi alasan anak putus sekolah"* Program ini sudah di jalan kan semana mestinya tetapi kadang bantuan KIP dan dana bos terkadang salah sasaran, ada pula yang mendapatkan bantuan tersebut tetapi di pakai untuk keperluan yang lain, contohnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud yaitu orang tua mereka yang oleh karena itu mereka tidak terlalu menghargai pendidikan anak nya, dan faktor sosial disini adalah jauhnya sekolah dari rumah mereka yang mengakibatkan anak tersebut malas untuk pergi ke sekolah, ada pun wawancara kepada bapak Nursyah Fajar,S.Sos.,M.Ap selaku kabid SMP Kabupaten Indragiri Hilir (selasa,07 mei 2024) mengatakan bahwa: *"Dinas Pendidikan sudah membangun sekolah di pelosok-pelosok desa yang bernama sekolah terbuka satu atap dan sekolah marjinal untuk siswa-siswi yang jauh supaya bisa bersekolah di sana "*. Sampai sekolah satu atap terpadu dan sekolah Marjinal telah di sediakan oleh dinas akan tetapi jika kemauan dari anak sendiri yang tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan maka percuma juga sekolah-sekolah tersebut di buka.

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat penulis ambil mengenai keterlibatan dinas pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah di kabupaten hilir Indragiri berdasarkan temuan penelitian

dan perbincangan yang dilakukan tim peneliti: Peran Departemen Pendidikan dalam menangani anak-anak putus sekolah terlihat jelas dalam seruan terkoordinasi kepada kepala sekolah, dengan memberikan kesempatan kepada siswa kurang mampu untuk bersekolah di sekolah paket A dan paket B, serta sekolah terpadu satu atap dan marginal. sekolah. Sebab, tujuan departemen adalah membangun sekolah alternatif, seperti sekolah paket A dan paket B, sekolah marginal, dan sekolah terpadu satu atap di daerah menantang, guna mencegah semakin banyaknya anak putus sekolah. Dapat disimpulkan bahwa Departemen Pendidikan menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani anak-anak putus sekolah, meskipun telah berupaya keras untuk mengurangi jumlah tersebut. Tantangan utama tetap pada anggaran atasan, meskipun departemen telah berupaya sebaik-baiknya untuk mengajukan permohonan dana atasan. untuk 200 kuota, namun yang benar-benar dibagikan hanya 100 Faktor lainnya juga bisa di lihat dari faktor lingkungan, faktor ekonomi orang tua, faktor minimnya minat belajar anak.

Saran

Penulis membuat rekomendasi berikut sehubungan dengan kesimpulan di atas: Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang kurang pada setiap sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir semakin meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, lakukan penjangkauan masyarakat untuk menekankan pentingnya mendidik anak-anak guna menjamin masa depan mereka. Kepada masyarakat agar lebih mengawasi pergaulan anak-anak di sekitar terutama orang tua kepada anak-anak nya dalam pergaulan anaknya, untuk mewaspadaai terjadinya anak putus sekolah. Kepada guru-guru yang mengajar di sekolah agar lebih memotivasi anak dalam belajar, agak anak tersebut bisa menyelesaikan pendidikannya. Dan memperhatikan pergaulan anak di dilingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi: Supriyanto dkk. 2009 _ *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*. ULL
- Ahmad Fauzi R. 2012. Analisis Peranan Pemeritahan Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten WWajo
- Budiarjo, Miriam. 2009 . *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta
- Dockery: Donna J_ 2012. "Masa 1ah Putus Sekolah (Dropout). Indikator, Tren, dan Interoensi Bagi konselor Sekolah%: Journal of School Counseling
- Effendi, Bachtigr. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta.
- El Muhtaj: MajcW 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* Jakaña: Grafindo Pers_
- Fani Fitria. 2018. Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015
- Hasballah: Fachruddin_ 2006. *Pertumbuhan dan Perkembangan Ana/c* Banda Aceh: Yayasan PeNA
- Iskandar, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Penerbit GP Pres.
- Jahro, A. Y. G. J., & Nasution, M. S. (2024). Conflict Management of Hot Spring Forest Tourism Objects in Pendalian IV Koto District, Rokan Hulu Regency. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 875-881.
- Mayarni, M., Heriyanto, M., Nasution, M. S., & Arumbinang, M. H. (2025). Synergy Between Smallholder Palm Oil Replanting Policies and Green Energy Initiatives: A Study of Impacts and Policies in Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 611, p. 03007). EDP Sciences.

- Muhammad Arif. 2018. Peran Dinas Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Keca`matan Pemulatan Selatan Kabupaten Ogan Hilir
- Mutiara Farah. 2014. *Faktor Penyebab Putus sekolah Dan Dampak Negatifnya Bagi Anak*
- Nevy Farista Aristin. 2015. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
- Nidraha,Taliziduhu2011.*kybernology jilid 1 dan 2 (ilmu pemerintahan baru)*, Jakarta cipta
- Nurcholis,Hanif.2007. *Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2006 Pada Pasal 1 ayat (1) Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rhumeta, R., & Nasution, M. S. (2024). Implementation of the Child Friendly City Implementation Policy in Pekanbaru City (Special Protection Cluster Case for Children). *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(1), 597-610.
- Ricardo Sapu`tra Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015
- Rivai,Veithzal (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori kePraktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saydam,Gouzali,2000..*Manajeen Sumber Daya Manusia*. Jakarta,Djembatan
- Shulhan, M. (2013). Supervisi Pendidikan (Teori dan Praktek dalam Mengembangkan SDM Guru). *Acima publishing*, 53 (9) 1689-1699.
- Suhardono.,Eko.2016. *Teori Peran,Konsep,dan Derivasi dan Implikasinya*. Jakaeta:Gramedia
- Sukirno sadono.2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo apaersada.
- Sukma, R. A. P., & Nasution, M. S. (2023). Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(2), 121-133.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yulika, D., & Nasution, M. S. (2024). Health Equipment Maintenance Management at Arifin Achmad Regional General Hospital, Riau Province. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(2), 1094-1108.
- Yuni talakua (peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon